

**PETA PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2011-2015**

Dina Huriaty¹, Mayang Gadih Ranti², & Zahra Chairani³

- 1. Program Studi Pendidikan Matematika STKIP PGRI Banjarmasin
dina_rty@yahoo.co.id (08213363000)**
- 2. Program Studi Pendidikan Matematika STKIP PGRI Banjarmasin
mayanggadiah@gmail.com (085248471668)**
- 3. Program Studi Pendidikan Matematika STKIP PGRI Banjarmasin
zahralpmp@yahoo.com (081251096682)**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan kondisi Pendidikan Dasar di Kabupaten Banjar Tahun 2011-2015. Penelitian ini dibatasi pada peta pendidikan dasar di Kabupaten Banjar sejak tahun 2011 hingga 2015 ditinjau dari indikator APS, APK, APM, MYS, APtS, AMH dan Peta Guru. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Teknik Pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banjar, Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar dan Kementerian Agama Kabupaten Banjar. Data dianalisis dengan statistik deskriptif, yaitu persentase dan rata-rata, serta penjelasan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian sebagai berikut. (1) APS di tingkat pendidikan dasar meningkat. Rata-rata APS kelompok umur 7-12 tahun sebesar 97,3% dengan kenaikan rata-rata sebesar 1,07%. Rata-rata APS kelompok umur 13-15 tahun sebesar 74,3% dengan kenaikan rata-rata sebesar 2,8%. (2) APK SD/MI/SDLB menunjukkan peningkatan dengan rata-rata sebesar 106,76%. Rata-rata APK SMP/MTs/SMPLB tampak berfluktuasi. (3) APM SD/MI/SDLB mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 93,59%. APM SMP/MTs/SMPLB seperti halnya APK juga berfluktuasi, dengan rata-rata sebesar 56,78%. (4) MYS terus mengalami peningkatan dengan rata-rata adalah 6,95 tahun. (5) APtS tingkat pendidikan dasar berfluktuatif dan mengalami penurunan di akhir tahun 2015. (6) AMH cenderung meningkat. Hingga tahun 2014 meningkat dengan kenaikan rata-rata 0,49 point. (7) Prosentase guru SD/MI/SDLB dengan kualifikasi S1/DIV mengalami peningkatan, sebesar 8,37%; pada jenjang SMP/MTs/SMPLB mengalami penurunan sebesar 5,62%. Prosentase guru pada tingkat pendidikan dasar yang telah bersertifikat mengalami peningkatan, dengan peningkatan masing-masing sebesar 19,77% dan 27,91%.

Kata kunci: *peta, pendidikan dasar, APS, APK, APM, MYS, APtS, AMH, guru*

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1 dinyatakan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Berdasarkan definisi tersebut, terdapat tiga pokok pikiran yang terkandung didalamnya, yaitu (1) usaha sadar dan terencana; (2) mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya;

dan (3) memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Melalui pendidikan kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat diharapkan akan meningkat (Mardapi, 2012: 1).

Berpangkal tolak dari hal tersebut dan sebagai tindak lanjut dari peraturan pemerintah dan undang-undang turunan lainnya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2005; dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dan Pemberantasan Buta Aksara, berbagai upaya dilakukan dalam rangka percepatan dan peningkatan kualitas kebijakan/program kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam aspek-aspek perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, maupun kelembagaan pembangunan daerah. Salah satu indikator kinerja makro yang menjadi ukuran pencapaian visi dan misi pembangunan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut UNDP, didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*a process of enlarging the choice of people*). IPM mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah/wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan yaitu: lamanya hidup, pengetahuan/tingkat pendidikan dan standard hidup layak. Berikut rumusan IPM.

$$IndeksX_{(i,j)} = \frac{(X_{(i,j)} - X_{(i-\min)})}{(X_{(i-\max)} - X_{(i-\min)})}$$
$$IPM_j = \frac{1}{3} \sum_i indeksX_{(i,j)}$$

IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara termasuk dalam negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik (sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)).

Angka Partisipasi pada bidang pendidikan berkontribusi besar pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator di bidang pendidikan yang merupakan indikator indeks pembangunan adalah Angka Partisipasi, yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM); Rata-rata Lama Masa Sekolah (MYS); dan Angka Putus Sekolah (APtS). Di antara indikator tersebut, yang sangat berpengaruh terhadap indikator lainnya adalah APK. Hal ini terjadi dikarenakan jika pencapaian APK tinggi maka angka pencapaian indikator lainnya, seperti APS, APM, MYS akan meningkat dan APtS akan menurun.

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya

bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Sejak Tahun 2009, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan (Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS)).

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan indikator untuk mengukur proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka partisipasi kasar dapat memberikan gambaran tentang banyaknya anak yang menerima pendidikan pada jenjang tertentu. Angka Partisipasi Kasar merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Sejak tahun 2007 Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Nilai APK bisa lebih dari 100%. Hal ini disebabkan karena populasi siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. Sebagai contoh, banyak anak-anak usia diatas 12 tahun, tetapi masih sekolah di tingkat SD atau juga banyak anak-anak yang belum berusia 7 tahun tetapi telah masuk SD. Adanya siswa dengan usia lebih tua dibanding usia standar di jenjang pendidikan tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di usia yang lebih muda.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Indikator APM merupakan indikator yang lebih baik dibanding dengan indikator APK, sebab APK biasanya digunakan ketika APM-nya masih jauh dari 100 persen. APK dapat mencapai lebih dari 100 persen, sedangkan APM semestinya maksimal 100 persen. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Keterbatasan APM adalah

kemungkinan adanya under estimate karena adanya siswa diluar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu.

Konsep definisi Rata-Rata Lama Sekolah (MYS) adalah Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung Rata-Rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi tentang: partisipasi sekolah, jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki, ijazah tertinggi yang dimiliki, dan tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki. MYS berguna untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Tingginya angka Rata-Rata Lama Sekolah (MYS) menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka MYS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya (sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)).

Angka Putus Sekolah (APtS) didefinisikan sebagai proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. APTS digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur. Semakin tinggi angka putus sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata. Begitu sebaliknya jika angka putus sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik. (Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)).

Angka Melek Huruf (AMH) didefinisikan sebagai proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji, dan lain-lain) terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. AMH digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang melek huruf. Dengan demikian, dapat dikaji seberapa banyak penduduk di suatu wilayah yang memiliki kemampuan dasar untuk memperluas akses informasi, menambah pengetahuan dan ketrampilan, memudahkan komunikasi, serta mempromosikan pemahaman yang lebih baik sehingga penduduk tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup diri, keluarga, maupun negaranya di berbagai bidang kehidupan. AMH dapat digunakan sebagai tolok ukur target perencanaan dan evaluasi program pemberantasan buta huruf; mengevaluasi program pemberantasan buta huruf; mengevaluasi program pemberantasan kemiskinan, program pembangunan di bidang kesehatan dan program pembangunan manusia lainnya; dan untuk mengidentifikasi jenis media informasi dan komunikasi yang dapat diakses masyarakat. Angka melek huruf berkisar antara 0-100. Tingkat melek huruf yang tinggi menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran (Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)).

Kabupaten Banjar merupakan salah satu dari 13 Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Pemerintah Kabupaten Banjar saat ini terus berupaya melakukan peningkatan sumber daya manusia. Di bidang pendidikan secara terus menerus dilaksanakan kegiatan dan program dalam rangka meningkatkan APK dan APM. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banjar

Tahun 2015 mencapai 66,39. Pencapaian ini masih tergolong rendah dibandingkan target yang ingin dicapai dalam RPJMD 2011-2015, yaitu 73,86 pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan masih rendahnya dimensi pendukung pencapaian hasil pembangunan di Kabupaten Banjar, yang salah satu dimensinya adalah bidang pendidikan.

Percepatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia akan melahirkan aksi-aksi yang selaras dengan visi dan misi Pemerintah Daerah. Visi Kabupaten Banjar tahun 2011-2015 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar yang Sejahtera, Mandiri, dan Islami”**. sedangkan misi pembangunan Kabupaten Banjar adalah (1) **Memantapkan suasana kehidupan masyarakat yang madani;** (2) **Memantapkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia;** (3) **Memantapkan pembangunan ekonomi kerakyatan dan mendorong iklim investasi;** (4) **Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;** dan (5) **Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pelayanan prima.** Pembangunan pendidikan dituangkan dalam Misi 1 dan Misi 2. Tujuan dari Misi 1 dan Misi 2 dalam bidang Pendidikan adalah meningkatkan kualitas kehidupan beragama masyarakat dan mewujudkan masyarakat yang berpendidikan dan berkualitas. Adapun sasarannya adalah terwujudnya kehidupan masyarakat yang madani, terwujudnya peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta lulusan di semua jenjang dan jalur pendidikan, terwujudnya peningkatan sarana prasarana dan aksesibilitas pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat, terwujudnya peningkatan budaya baca masyarakat.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui peta yang menggambarkan kondisi Pendidikan Dasar di Kabupaten Banjar tahun 2011-2015. Penelitian ini dibatasi pada peta pendidikan dasar yang ditinjau dari indikator APS, APK, APM, MYS, APtS, AMH dan Peta Guru. Tahun 2011-2015 merupakan tahapan II dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah menjadi masukan bagi setiap *stakeholders* dalam melaksanakan strategi pendidikan untuk mencapai tujuan dengan lebih fokus, efisien, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan sehingga dapat mempercepat tersusunnya kebijakan yang dapat mendukung kelancaran perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi bidang pendidikan secara optimal.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. (Sugiyono: 2008, 21). Pada penelitian ini akan didekripsikan kondisi pendidikan dasar di Kabupaten. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banjar, Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar dan Kementerian Agama Kabupaten Banjar. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi berupa data APS, APK, APM, MYS, APtS, AMH dan data guru. Data dianalisis dengan statistik deskriptif, yaitu persentase dan rata-rata, serta menggunakan penjelasan deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kondisi Umum Pendidikan di Kabupaten Banjar

Pendidikan di Kabupaten Banjar terdiri atas tingkat pendidikan dasar dan menengah. sebagian besar fasilitas dan pembiayaan diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan pendidikan dasar 9 tahun yaitu fasilitas SD dan SMP. Jumlah sekolah dari jenjang SD sampai dengan SMA di Kabupaten Banjar sebanyak 665 sekolah dengan rincian jumlah sekolah negeri di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar sebanyak 477 sekolah, dengan rincian 361 SD, 2 SDLB, 71 SMP, dan 16 SMA/SMK (10 SMA dan 6 SMK). Sekolah swasta berjumlah 27 buah (5 SD, 1 SDLB, 6 SMP, 2 SMPLB, 6 SMA, 5 SMK dan 2 SMALB). Secara keseluruhan jumlah siswa yang ditampung adalah 65.867 orang dengan sebanyak 5.813 guru, berarti rasio guru berbanding siswa 1:12. Sementara sekolah yang berada dalam lingkup Kementerian Agama Tingkat MI/MTs/MA baik negeri maupun swasta berjumlah 188 sekolah, dengan guru sebanyak 3.130 orang dan siswa 28.039 orang, sehingga rasio guru dan siswa sekitar 1:9 (Sumber: RPJMD Kabupaten Banjar).

Salah satu indikator pembangunan manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Berdasarkan data BPS Kabupaten Banjar diperoleh Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Banjar tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Banjar Tahun 2011-2015

Dari grafik tersebut terlihat dari tahun 2011 s.d 2015 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Banjar mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan rata-rata menunjukkan angka 65,45. Berdasarkan klasifikasi IPM BPS (2015), Rata-rata IPM di Kabupaten Banjar termasuk klasifikasi sedang.

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Peningkatan kualitas SDM dilakukan salah satunya melalui Pendidikan. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah.

2. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Data APS di Kabupaten Banjar tahun 2011-2015 untuk masing-masing tingkat SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPLB dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1
Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Banjar
Tahun 2011-2015

Kelompok Umur (tahun)	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
7-12	94,37	97,05	98,26	98,18	98,64
13-15	68,40	74,54	72,39	76,66	79,51

(Sumber: BPS Kab. Banjar)

Berdasarkan data APS di atas menunjukkan bahwa untuk kelompok umur 7-12 tahun angka rata-rata partisipasi siswa yang menempuh pendidikan jenjang sekolah dasar sejak tahun 2011 hingga 2015 sebesar 97,3% dengan kenaikan rata-rata sebesar 1,07%; sedangkan Angka Partisipasi Sekolah pada tingkat Sekolah Menengah Pertama menunjukkan rata-rata 74,3% dengan kenaikan rata-rata sebesar 2,8% setiap tahunnya.

3. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Data capaian APK Jenjang SD/MI/SDLB sejak tahun 2011 hingga 2015, bersumber dari BPS menunjukkan peningkatan. Mengacu pada data tersebut diperoleh rata-rata APK sebesar 106,76% dengan rata-rata peningkatan sebesar 2,1 %. Rata-rata APK untuk jenjang SMP/MTs/SMPLB dari 2011 hingga 2015 tampak berfluktuasi. Data pada tahun 2015 meningkat sebesar 6,8% dibandingkan tahun 2014. Secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar
di Kabupaten Banjar Tahun 2011-2015

Jenjang	2011	2012	2013	2014	2015
SD/MI/SDLB	101.19	105.63	107.91	108.75	110.30
SMP/MTs/SMPLB	73.17	78.43	70.03	69.05	75.85

(Sumber: BPS Kab. Banjar)

4. Angka Partisipasi Murni (APM)

Data Capaian APM Pendidikan Dasar di Kabupaten Banjar ditunjukkan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3
Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar
di Kabupaten Banjar Tahun 2011-2015

Jenjang	2011	2012	2013	2014	2015
SD/MI/SDLB	90.13	92.09	94.77	95.42	96.53
SMP/MTs/SMPLB	55.65	55.50	53.75	55.39	63.59

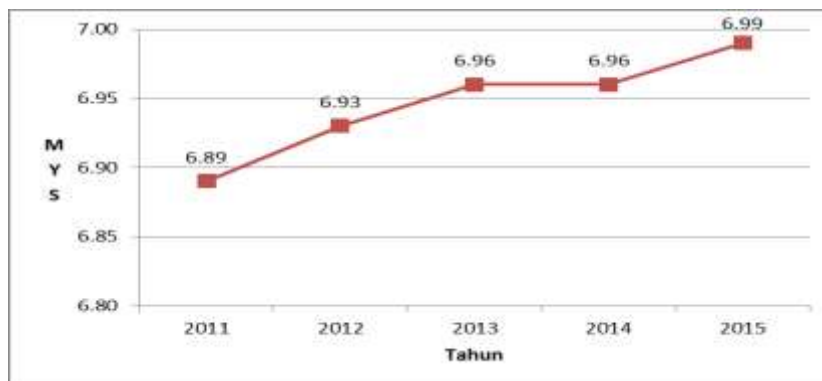
(Sumber: BPS Kab. Banjar)

Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SD/MI/SDLB dari 2011-2015 berdasarkan data BPS terus mengalami peningkatan dengan capaian rata-rata sebesar 93,59% setiap tahunnya. APM untuk jenjang SMP/MTs/SMPLB seperti halnya APK juga berfluktuasi, dengan rata-rata sebesar 56,78%.

5. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (MYS)

Rata-Rata Lama Sekolah (MYS) adalah Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Tingginya angka Rata-rata Lama Sekolah (MYS) menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Data MYS di Kabupaten Banjar pada tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Gambar 2.

Angka MYS Kabupaten Banjar terus mengalami peningkatan dari tahun 2011 hingga tahun 2015. MYS memperlihatkan kenaikan dengan rata-rata 0,03. Rata-rata MYS Kabupaten Banjar Tahun 2011-2015 adalah 6,95 tahun.



Gambar 2. MYS di Kabupaten Banjar Tahun 2011-2015

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar

6. Angka Putus Sekolah (APtS)

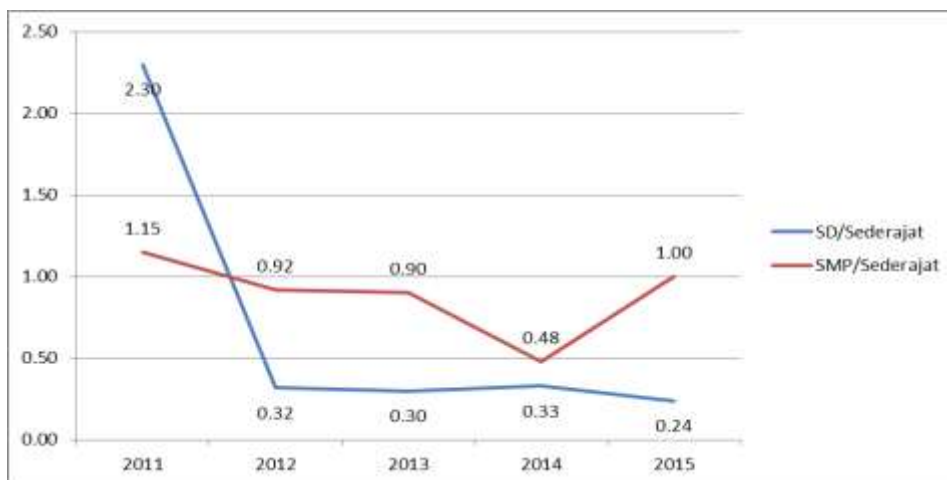
Tabel 4

Angka Putus Sekolah (APtS) di Kabupaten Banjar

Jenjang	2011	2012	2013	2014	2015
SD/ Sederajat	2.30	0.32	0.30	0.33	0.24
SMP/ Sederajat	1.15	0.92	0.90	0.48	1.00

Sumber Data: Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar

AptS Kabupaten Banjar untuk Tahun 2011-2015 mengalami fluktuasi baik untuk tingkat SD/MI/SDLB dan tingkat SMP/MTs/SMPLB seperti terlihat pada gambar di bawah ini.

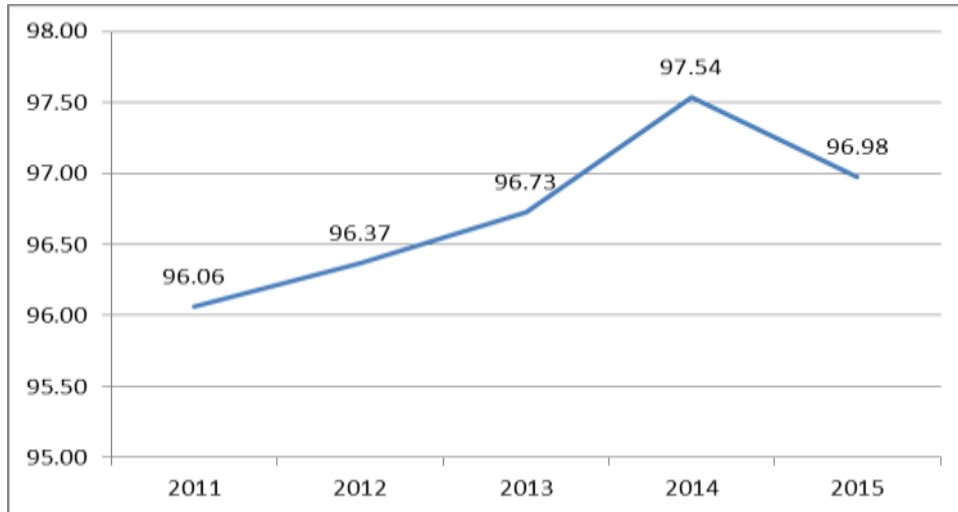


Gambar 3. APtS Kabupaten Banjar Tahun 2011-2015

APtS untuk jenjang SD/Sederajat berfluktuatif . Angka putus sekolah pada tahun 2011 mencapai 2,30, kemudian turun menjadi 0,32 pada tahun berikutnya. Meskipun terjadi fluktuasi, tetapi angka putus sekolah mengalami penurunan hingga point 0,24 pada tahun 2015. Untuk jenjang SMP/ sederajat, APtS juga berfluktuatif dengan kisaran 1,15 pada tahun 2011 menjadi 1,00 pada tahun 2015.

7. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka melek huruf di Kabupaten Banjar tahun 2011-2015 cenderung meningkat seperti terlihat pada Gambar 4.



Gambar 4. AMH Kabupaten Banjar Tahun 2011-2015

(Sumber: BPS Kab. Banjar)

Data BPS menunjukkan kenaikan AMH pada tahun 2011 hingga 2014, dengan kenaikan rata-rata sebesar 0,49 point. Meskipun terjadi penurunan angka melek huruf di tahun 2015 dibandingkan tahun 2014, tapi angka ini masih menunjukkan kenaikan dibandingkan data tahun 2011 atau tahun 2013.

8. Peta Guru

Indikator-indikator pencapaian pendidikan terkait guru atau standar pendidik terdiri atas: (1) Prosentase guru SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPLB dengan kualifikasi S1/D IV dan (2) Prosentase guru SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPLB yang bersertifikat. Data per-indikator tahun 2014-2015 dapat dilihat pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5
Indikator Standar Pendidik

Indikator	Tahun	
	2014	2015
Prosentase guru SD/MI/SDLB dengan kualifikasi S1/DIV	57,63	66,00
Prosentase guru SMP/MTs/SMPLB dengan kualifikasi S1/DIV	78,62	73,00
Prosentase guru SD/MI/SDLB yang bersertifikat	40,23	60,00
Prosentase guru SMP/MTs/SMPLB yang bersertifikat	38,46	66,37

(Sumber: Profil Pendidikan Kabupaten Banjar yang diolah)

Berdasarkan tabel di atas diperoleh bahwa dari tahun 2014 dan 2015 prosentase guru SD/MI/SDLB dengan kualifikasi S1/DIV mengalami peningkatan, dengan peningkatan prosentase sebesar 8,37%; sedangkan pada jenjang SMP/MTs/SMPLB tahun 2015 tampak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 5,62%. Prosentase guru pada tingkat pendidikan dasar yang telah bersertifikat mengalami peningkatan. Pada jenjang SD/MI/SDLB mengalami peningkatan sebesar 19,77% dan pada jenjang SMP/MTs/SMPLB sebesar 27,91%.

PEMBAHASAN

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencerminkan tingkat keberhasilan pembangunan di suatu wilayah. Suatu daerah dikatakan maju jika Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada di atas rata-rata sesuai dengan syarat dalam *Millenium Development Goals (MDG's)* atau di Indonesia disebut dengan Pendidikan untuk Semua/*Education for All (PUS/EFA)*. Data tahun 2011-2015 menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Banjar mengalami peningkatan dari tahun ketahun dengan rata-rata menunjukkan angka 65,45. Meskipun indeks yang dicapai masih termasuk klasifikasi sedang, tetapi indeks tersebut menunjukkan peningkatan. Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan pembangunan di Kabupaten Banjar, tidak terkecuali pembangunan bidang pendidikan.

Bidang pendidikan menjadi salah satu indikator IPM. Indikator-indikator pendidikan yang termasuk dalam perhitungan IPM adalah Harapan Lama Sekolah/*Expected Years of Schooling (HLS/EYS)* dan Rata-Rata Lama Sekolah/*Mean Years of Schooling (RLS/MYS)*. Variabel HLS yang digunakan adalah partisipasi sekolah penduduk menurut kelompok umur dan variabel RLS adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS), jenjang pendidikan yang pernah diduduki, kelas yang sedang dijalani, dan jenjang pendidikan yang ditamatkan.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah, APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah, Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. APS di Kabupaten Banjar pada kelompok umur pendidikan dasar menunjukkan peningkatan setiap tahunnya dengan rata-rata kenaikan sebesar 1,07% untuk kelompok umur 7-12 tahun dan 2,8% untuk kelompok umur 13-15 tahun. Dari angka ini berarti bahwa rata-rata sebanyak 1.400 penduduk usia sekolah dasar dan menengah pertama telah mendapat kesempatan pendidikan setiap tahunnya. Mengamati data tahun 2015, APS menunjukkan angka 98,64% atau hanya 1,36% penduduk kelompok umur 7-12 tahun yang belum terserap di SD sederajat; sedangkan untuk kelompok umur 13-15 tahun, APS berada pada 79,51% atau 20,49% penduduk kabupaten Banjar yang belum mendapat kesempatan sekolah di jenjang SMP sederajat.

Kondisi APS tersebut sejalan dengan capaian APK dan APM. Angka Partisipasi Kasar (APK) sejak tahun 2011 hingga 2015 di Kabupaten Banjar mengalami peningkatan. Data tahun 2015, APK SD/MI/SDLB berada pada angka 110,30%. Data ini menempatkan posisi relatif APK untuk jenjang SD/MI/SDLB Kabupaten Banjar di urutan pertama dari 13 Kabupaten/Kota di Provinsi

Kalimantan Selatan, yaitu 105,38%, Angka ini juga berada diatas capaian nasional, yaitu sebesar 109,05%. APK untuk jenjang SMP/MTs/SMPLB pada tahun 2015 di Kabupaten Banjar berada pada 75,85%, angka ini masih berada dibawah capaian provinsi Kalimantan Selatan, yaitu 97,68% dan Indonesia, yaitu 100,51%, Kondisi ini menempatkan APK SMP/MTs/SMPLB Kabupaten Banjar berada pada urutan ke 13 di antara 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

Rata-rata dan capaian tahun 2015 menunjukkan bahwa APM SD/MI/SDLB Kabupaten Banjar terus meningkat dan mencapai 96,53%. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan capaian provinsi, sebesar 95,21% dan nasional sebesar 93,63%. APM SD/MI/SDLB ini menempatkan capaian Kabupaten Banjar berada pada posisi ke 7 dari 13 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Sementara itu, APM SMP/MTs/SMPLB Kabupaten Banjar tahun 2015 mencapai 63,59%. Angka ini menempatkan pencapaian Kabupaten Banjar di urutan ke 13 dari 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan,

Tingginya angka Rata-rata Lama Sekolah (MYS) menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang, MYS memperlihatkan angka yang kenaikan yang kecil yaitu kurang dari 0,1 nya dari tahun ketahun selama 5 tahun, Rata-rata MYS Kabupaten Banjar Tahun 2011-2015 adalah 6,95 tahun. Angka MYS Kabupaten Banjar berada di bawah rata-rata MYS provinsi Kalimantan Selatan, yaitu sebesar 7,76 tahun. Memperhatikan angka MYS 6,95 menunjukkan bahwa penduduk kabupaten Banjar pada kurun waktu 2011-2015 telah menyelesaikan wajar 6 tahun dan rata-rata hanya menempuh pendidikan hingga kelas 7 SMP sederajat. Hal ini juga didukung oleh data APS yang menunjukkan bahwa masih terdapat 20,49% penduduk kabupaten Banjar yang belum mendapat kesempatan sekolah di jenjang SMP sederajat

Angka Putus Sekolah (APtS) merupakan proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. APtS idealnya adalah 0%. Di Kabupaten Banjar, APtS untuk tingkat pendidikan dasar, terutama di jenjang SD sederajat terus menurun. Pada tahun 2015 sudah mencapai 0,24%. Pada jenjang SMP sederajat APtS masih berada pada 1%. Jika mengamati jumlah penduduk usia SMP sederajat tahun 2015, maka terdapat sekitar 300 anak yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak tamat jenjang SMP sederajat. Memperhatikan jumlah tersebut sangatlah sedikit, namun Pemerintah masih perlu melakukan berbagai upaya untuk menekan angka putus sekolah, agar program Wajib Belajar 9 tahun yang menjadi salah satu program bidang pendidikan di Kabupaten Banjar dapat terwujud.

Angka Melek Huruf di Kabupaten Banjar terus mengalami peningkatan. Penduduk di Kabupaten Banjar yang berusia 15 tahun ke atas yang melek huruf atau memiliki kemampuan membaca dan menulis semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah penduduk yang buta aksara. Penurunan jumlah penduduk buta akasara menggambarkan adanya konsistensi pemerintah kabupaten Banjar dalam menuntaskan buta aksara. Upaya pemerintah dalam menuntaskan buta aksara menempatkan pemerintah Kabupaten Banjar menjadi salah satu penerima “Anugerah Aksara Madya” dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI pada tahun 2015.

Guru sebagai pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang dibuktikan dengan ijazah, sedangkan kompetensi guru dibuktikan dengan sertifikat kompetensi guru. Data guru pada jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPLB terjadi peningkatan kualitas. Hal ini ditandai dengan meningkatnya prosentasi guru yang berkualifikasi S1/DIV dan memiliki sertifikat pendidik. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah kabupaten Banjar dalam peningkatan kualitas dan kuantitas guru melalui berbagai program.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, pendidikan kabupaten Banjar tahun 2011-2015 yang dipetakan berdasarkan beberapa indikator yaitu APS, APK, APM, APtS, AMH dan data guru dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. APS di tingkat pendidikan dasar meningkat. Rata-rata APS kelompok umur 7-12 tahun sebesar 97,3% dengan kenaikan rata-rata sebesar 1,07%. Rata-rata APS kelompok umur 13-15 tahun sebesar 74,3% dengan kenaikan rata-rata sebesar 2,8%.
2. APK SD/MI/SDLB menunjukkan peningkatan dengan rata-rata sebesar 106,76%. Rata-rata APK SMP/MTs/SMPLB tampak berfluktuasi.
3. APM SD/MI/SDLB mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 93,59%. APM SMP/MTs/SMPLB seperti halnya APK juga berfluktuasi, dengan rata-rata sebesar 56,78%.
4. MYS terus mengalami peningkatan dengan rata-rata adalah 6,95 tahun.
5. APtS tingkat pendidikan dasar berfluktuatif dan mengalami penurunan di akhir tahun 2015.
6. AMH cenderung meningkat, hingga tahun 2014 meningkat dengan kenaikan rata-rata 0,49 point.
7. Prosentase guru SD/MI/SDLB dengan kualifikasi S1/DIV mengalami peningkatan, sebesar 8,37%; pada jenjang SMP/MTs/SMPLB mengalami penurunan sebesar 5,62%. Prosentase guru pada tingkat pendidikan dasar yang telah bersertifikat mengalami peningkatan, dengan peningkatan masing-masing sebesar 19,77% dan 27,91%.

Hasil penelitian ini memberikan gambaran tentang peta pendidikan dasar di Kabupaten Banjar. Beberapa program yang harus diselesaikan guna meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Banjar, dalam upaya terus menekan angka putus sekolah, meningkatkan angka partisipasi dan angka melek huruf, serta meningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru. Berbagai kebijakan perlu dirumuskan oleh berbagai SKPD terkait di bidang pendidikan guna mencapai kualitas pendidikan yang diharapkan, khususnya Pendidikan Dasar di Kabupaten Banjar.

DAFTAR RUJUKAN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar & Lembaga Penelitian Universitas Lambung Mangkurat. 2015. *Laporan Penelitian: Kajian tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Banjar*. Banjarmasin: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar dan Universitas Lambung Mangkurat.

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar. 2016. *Kabupaten Banjar dalam Angka Tahun 2016*. Kabupaten Banjar: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar.
- Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar. 2016. *Profil Pendidikan Tahun 2016-2017 Kabupaten Banjar*. Kabupaten Banjar: Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar.
- Mardapi, Djemari. 2012. *Pengukuran, Penilaian dan Evaluasi Pendidikan*. Yogyakarta: Nuha Litera.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar. 2005. *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025*.
- , 2011. *RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2011-2015*. Kabupaten Banjar: Pemerintah Kabupaten Banjar.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan: (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)*. Bandung: Alfabeta.